

PELAKSANAAN AUDIT MUTU DALAM MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

*Implementation Of Quality Audit In Realizing Good University Governance
At The University Muhammadiyah Parepare*

Darmawan ¹⁾, Syamsu Alam ²⁾, Junaidin Zakaria ³⁾

Email : darmawan8387@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
Jl. Urip Sumoharjo KM.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Abstract

Education Quality is the level of conformity between the implementation of higher education with Higher Education Standards consisting of National Higher Education Standards and Higher Education Standards set by universities. The objectives in this study are: To determine the adequacy of regulations owned as guidelines for the implementation of Higher Education operational activities, To find out the existence of national standards used as a reference in carrying out Higher Education operational activities, To find out the existence of Higher Education standards as a reference for the implementation of operational activities adapted from local, national and international and to find out the quality audit process carried out by UMPAR thus guarantees that the implementation of PT operational activities is in accordance with the regulations owned. The research approach used is a qualitative approach, the data analysis technique used is qualitative data analysis with three lines of analysis such as data reduction, data presentation, and conclusions. The results in this study are 1) The implementation of education at the University of Muhammadiyah Parepare still refers to the policies of the central government and the Muhammadiyah organization. 2) The University of Muhammadiyah Parepare needs to prepare itself well by developing a strategic plan to support the implementation of operational activities in facing future challenges Implementation of a program and activity for the next 5 years. 3) Internal Quality Assurance Standard Policy of the University of Muhammadiyah Parepare covers all aspects of higher education implementation with the main focus on aspects of education, research, community service, and Al Islam-Kemuhamadiyahan, The results of the implementation of the internal quality assurance system with the form of evaluation of the PPEPPP model are readiness to implement accreditation for study programs within the University of Muhammadiyah Parepare.

Keywords : Quality Audit, Good University Governance

Abstrak

Mutu Pendidikan merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tujuan dalam penelitian ini yakni: Untuk mengetahui kecukupan regulasi yang dimiliki sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional Perguruan Tinggi, Untuk mengetahui keberadaan standar nasional yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional Perguruan Tinggi, Untuk mengetahui keberadaan standar Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional yang diadaptasi dari lokal, nasional dan internasional dan untuk mengetahui proses audit mutu yang dilakukan oleh Umpar sehingga menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan operasional PT telah sesuai dengan regulasi yang dimiliki. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan tiga jalur analisis seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini yakni 1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan organisasi Muhammadiyah. 2) Universitas Muhammadiyah Parepare perlu mempersiapkan diri secara baik dengan menyusun rencana strategi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam menghadapi tantangan masa depan Implementasi suatu program dan kegiatan selama 5 Tahun mendatang. 3) Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhamadiyahan, Hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dengan bentuk evaluasi model PPEPPP merupakan kesiapan pelaksanaan akreditasi bagi program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare

Kata Kunci: Audit Mutu, Good University Governance

PENDAHULUAN

Undang-undang tentang pendidikan tinggi menyebutkan setidaknya terdapat 5 faktor yang menentukan kualitas suatu perguruan tinggi, antara lain sarana dan prasarana yang mendukung, fasilitas yang memadai, kualitas dosen yang cukup, kemampuan civitas akademika untuk meneliti serta untuk terus meningkatkan kompetensi dan keahlian (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Lembaga audit yang mandiri dan terlepas dari intervensi menjadi salah satu hal yang berperan menjaga kualitas perguruan tinggi tersebut, dalam hal ini sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjaga kualitas pendidikan (Pradana., 2022). SPMI merupakan kegiatan internal dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menjaga mutu serta mengawasi jalannya pendidikan tinggi agar tetap sesuai dengan amanat dari undang-undang (Menristekdikti Republik Indonesia, 2015).

Peran pendidikan tinggi tidak hanya sebatas pengalihan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun juga berfungsi mengembangkan IPTEKS serta menjadi *driving force* dalam proses modernisasi dan transformasi dari keadaan sekarang menuju masa depan (Rabiah 2019; Mulyasa dan Aryani 2022). Perguruan tinggi juga berperan sebagai pembentuk karakter bangsa dan menjadi lokomotif perubahan sosial (Saleh 2017; Fridiyanto 2020). Oleh karena itu perguruan tinggi harus dikelola secara profesional sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Masih banyaknya Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mendapat akreditasi B, C bahkan ada yang belum terakreditasi menyebabkan Majelis Diktilitbang berupaya untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pendampingan akreditasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan maraknya isu terkait akreditasi maka akan memiliki efek pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dimana Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang masih terakreditasi C maka akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan persaingan dunia kerja dimana ada beberapa instansi dan perusahaan yang mensyaratkan akreditasi minimal B. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memberikan pedoman sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal serta arahan supaya segala aktivitas Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi yang selanjutnya dapat meningkatkan akreditasi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pengendalian internal dalam bagian keuangan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah pun melakukan pengendalian internal terhadap mutu pendidikan. Mutu Pendidikan merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki suatu komitmen untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik itu bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem penjaminan mutu. Dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki sebuah lembaga yang menjadi pengendali bagian akuntansi dan bagian mutu pendidikan yang dinamakan Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah pun memberikan keleluasaan kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk melakukan pengembangan akademik perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan program studi yang diminati. Karena setiap daerah berbeda-beda program studi yang menjadi unggulan.

Kampus tidak hanya tempat yang berperan dalam mengembangkan keilmuan, tetapi juga membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial dan mengembangkan karakter. Sebagai pusat peradapan modern, kampus sudah selayaknya menjunjung tinggi integritas dan menjaga nilai-nilai *Good corporate Governance* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Salahuddin., 2018).

Penjaminan mutu sebagai bagian sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang terencana dan berkelanjutan, hal tersebut selaras dengan UU No. 12 tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa SPMI memiliki kegiatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan tentang penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar serta peningkatan standar perguruan tinggi.

Sebagai perguruan tinggi yang berfungsi mencetak bakal calon ahli sudah selayaknya memiliki sistem GCG sebagai bagian tak terpisahkan untuk mengatur perguruan tinggi bekerja semata-mata untuk kepentingan kebaikan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan mencetak calon para ahli. Standar mutu yang ditetapkan dalam perguruan tinggi jika disikapi secara konsisten, tak hanya menghasilkan sebuah SDM yang berkualitas, namun juga menghasilkan sebuah lulusan kompetitif dan berperan dalam meningkatkan kemajuan negara.

Pada aspek Responsibility sudah terpenuhi dengan evaluasi laporan keuangan ke dalam dan penyaluran CSR. Pada Aspek Independensi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) juga sudah memadai yang dibuktikan dengan dibuatnya laporan keuangan secara mandiri khusus untuk Bank Syariah Mandiri Makassar artinya lepas dari induk konvensional, meskipun Laporan atas

pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) masih menyatu dengan konvensional, dan Aspek yang terakhir yaitu Fairness atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah memadai (Wahyuni et al., 2020)

Tingginya kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di suatu negara turut berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) negara tersebut. Proses perubahan arus perkembangan global yang relatif cepat mengharuskan perguruan tinggi untuk selalu beradaptasi melalui proses yang berkelanjutan agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder. SPMI menjadi salah satu jalan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu terbaik.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mendapat akreditasi B, C bahkan ada yang belum terakreditasi menyebabkan Majelis Diktilitbang berupaya untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pendampingan akreditasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan maraknya isu terkait akreditasi maka akan memiliki efek pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dimana Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang masih terakreditasi C maka akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan persaingan dunia kerja dimana ada beberapa instansi dan perusahaan yang mensyaratkan akreditasi minimal B. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memberikan pedoman sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal serta arahan supaya segala aktivitas Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi yang selanjutnya dapat meningkatkan akreditasi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan bermutu, maka perwujudan *Good University Governance* (GUG) merupakan suatu keharusan yang diwujudkan dalam pengelolaan perguruan tinggi (Putrika dan Dwija 2021). GUG merupakan konsep yang memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja perguruan tinggi yang jika diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, maka dapat meningkatkan budaya mutu dalam pelayanan akademik dan non akademik sehingga terwujud pencitraan positif, reputasi yang unggul, dan kualitas daya saing yang tinggi (Rosyid, Fakhriana, dan Huda 2014).

GUG dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip: *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan), penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, dan nirlaba (Anon, 2022; Fuad dan Apriyanti 2018).

Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) yaitu dengan implementasi sistem penjaminan mutu (Zunaidi, Andriani, dan Putri 2022). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. Siklus SPMI terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam mewujudkan visi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* (Hendrawan dan Yulianeu 2017), Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai upaya meningkatkan mutu serta dapat mewujudkan budaya mutu (Sulaiman dan Wibowo 2016; Pater, Yudana, dan Natajaya 2020).

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh SPMI sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap beberapa standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tujuan akhir dari AMI yang dilaksanakan secara rutin adalah untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi sebagai salah satu tanggung jawab *good university governance* kepada para *stakeholder* (Zunaidi et al., 2022).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan suatu wujud pelayanan Muhammadiyah kepada masyarakat untuk menghasilkan kader intelektual pada bidang akademis. Setidaknya ada 154 Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada dari Sabang sampai dengan Merauke hingga Agustus 2020. Diantaranya berbentuk 63 Universitas, 73 Sekolah Tinggi, 13 institut, 2 Akademi dan 3 politeknik. Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan kegiatan dibidang Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bernaung dan dalam pengawasan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Dikti Litbang PP Muhammadiyah). Dalam majelis ini menaungi Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki tugas dalam menjaga mutu dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh kampus penyelenggara pendidikan tinggi. Mutu dalam perguruan tinggi harus dijaga karena berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan yang terencana dan berkelanjutan. Sehingga dalam prosesnya penjaminan mutu didasarkan atas dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai standar yang memuat arah, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan standar mutu terdiri atas instrumen dalam mencapai standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari penjaminan bahwa standar yang dibuat telah dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi dan ditingkatkan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri dan audit internal.

Audit mutu internal dilaksanakan sebagai bagian dari penjaminan mutu tersebut yang mana kegiatannya berupa monitoring dan evaluasi atas kinerja selama tahun terakhir.

Selain GUG elemen penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkhusus Universitas Muhammadiyah Parepare adalah sistem pengendalian internal. Dalam pengelolaannya Universitas Muhammadiyah Parepare telah membentuk badan pengawas dan pengendali pengelolaan seluruh aset organisasi pada sektor pendidikan yaitu konsorsium internal auditor. Adapun yang mendorong terbentuknya konsorsium Internal Auditor (IA) PTM/A ini yaitu pentingnya pengelolaan aset Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara profesional dalam langkah mewujudkan Good University Governance. Pembentukan konsorsium Internal Auditor Universitas Muhammadiyah Parepare ini termasuk dalam upaya meningkatkan pengendalian internal bagian keuangan dalam organisasi nirlaba ini.

Berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang GUG di universitas, diantaranya kajian tentang implementasi GUG pada perguruan tinggi Islam (Fuad dan Apriyanti 2018), efektifitas manajemen kepemimpinan dalam menciptakan GUG (Rostiawati 2020), pengaruh penerapan akuntansi manajemen dan teknik manajemen terhadap GUG (Muktiyanto 2016), dan sistem informasi perguruan tinggi dan GUG (Tajuddin, Nimran, dan Astuti 2016). Namun dari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya, masih sangat kurang yang mengaitkan antara implementasi pelaksanaan audit mutu dalam mewujudkan GUG diperguruan tinggi, padahal penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan *prototipe* bagaimana peran dan implementasi SPMI dalam mewujudkan GUG di perguruan tinggi khususnya di Universitas Muhammadiyah Parepare, hasil penelitian ini juga nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi pengelola perguruan tinggi dan program studi dalam mewujudkan GUG dengan implementasi SPMI secara berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Parepare dan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu bulan September – Nopember 2023. Teknik pengumpulan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono (2010:300) yaitu teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, maka dengan itu, informan terdiri dari Tim Audit Internal, Lembaga penjaminan mutu internal, mahasiswa, Unit pelaksana operasional. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan (observasi) terlebih dahulu, melakukan wawancara dan melakukan dokumentasi atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri". Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu : Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Bentuk penyajian data kualitatif

1. Teks naratif: berbentuk catatan lapangan
2. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama beradadi lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Universitas Muhammadiyah Parepare telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan *good university governance*. Dalam hal implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam mewujudkan *good university governance* (GUG) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi memiliki nilai-nilai khusus yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional sehingga Perguruan Tinggi bisa berkelanjutan

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan organisasi Muhammadiyah, sehingga dalam penyusunan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Parepare tetap mengacu pada visi dan misi Pendidikan Nasional dalam hal ini Pendidikan Tinggi serta visi dan misi organisasi Muhammadiyah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang selanjutnya dikombinasikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare saat ini. Visi Universitas Muhammadiyah Parepare, dinyatakan sebagai berikut:

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam IPTEKS berdasarkan Nilai-Nilai Islami pada Tahun 2033

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Parepare menggambarkan kondisi Universitas Muhammadiyah Parepare yang ingin diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika di masa yang akan datang. Rumusan visi diatas merupakan hasil perubahan dari rumusan visi sebelumnya yaitu Universitas Muhammadiyah Parepare yang Islami dan Kompetitif dalam IPTEKS. Adapun perubahan tersebut terletak pada kata kompetitif menjadi unggul yang mencerminkan bahwa Universitas Muhammadiyah Parepare perlu mengembangkan diri menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sejajar atau lebih dari perguruan tinggi lain.

Target Universitas Muhammadiyah Parepare adalah menjadi perguruan tinggi yang masuk 5 (lima) terbaik di Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 dan masuk 10 (sepuluh) terbaik di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2023. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Universitas Muhammadiyah Parepare** adalah suatu lembaga pendidikan yang akan dikembangkan lebih maju dari lembaga pendidikan lainnya di wilayah Sulawesi.
- b. **Islami** merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
- c. **Unggul** adalah hasil upaya yang kompetitif dari suatu langkah yang proaktif yang dilakukan pada setiap perubahan melalui perencanaan yang sistematis dan komprehensif. Unggul merupakan hal yang ingin diwujudkan dalam pengembangan ipteks untuk dapat memiliki daya saing tinggi sehingga dapat sejajar dengan atau lebih dari PTS dan PTN lainnya di Kawasan Timur Indonesia pada Tahun 2023.
- d. **Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)** merupakan sesuatu yang harus dikaji terus menerus yang dapat mengantarkan dan memudahkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kreatif, inovatif, berakhlak mulia, penuh rasa percaya diri, beretos kerja tinggi dan bertanggungjawab.

Arah kebijakan program merupakan suatu langkah taktis yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran dalam Implementasi suatu program dan kegiatan selama 5 Tahun mendatang, yaitu :

- a. Kebijakan bidang Pendidikan dan Pengajaran tahap I (2018-2023)
 - 1) Peningkatan kuantitas program studi yang terakreditasi
 - 2) Peningkatan jumlah mahasiswa
 - 3) Peningkatan kualifikasi tenaga pengajar
 - 4) Menerapkan sistem informasi berbasis WAN
 - 5) Menerapkan sistem pembelajaran berbasis daring
 - 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi sivitas akademik
 - 7) Meningkatkan penjaminan mutu secara menyeluruh
 - 8) Mengoptimalkan rasio dosen dan mahasiswa
 - 9) Peningkatan kuantitas jumlah program pendidikan profesi, program studi, fakultas dan sekolah pascasarjana
- b. Kebijakan bidang Penelitian tahap I (2018-2023)
 - 1) Mengoptimalkan kluster riset
 - 2) Menerapkan riset berbasis luaran
 - 3) Mengoptimalkan website sebagai sarana penunjang
 - 4) Menyediakan sarana publikasi

- 5) Mengoptimalkan fungsi kerja kelembagaan yang menangani riset dan hasil luaran
- 6) Pengalokasian anggaran riset bagi dosen dan mahasiswa
- c. Kebijakan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat tahap I (2018-2023)
 - 1) Tingginya animo dosen dalam melaksanakan pengabdian
 - 2) Mengoptimalkan fungsi kerja kelembagaan yang menangani riset dan hasil luaran
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Pengalokasian anggaran program pengabdian bagi dosen dan mahasiswa
- d. Kebijakan bidang Al-Islam Kemuhammadiyah tahap I (2018-2023)
 - 1) Penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dan bangsa
 - 2) Optimaslisasi pengkaderan Al-Islam Kemuhammadiyah
 - 3) Pemberdayaan tenaga pengajar Al-Islam Kemuhammadiyah
 - 4) Internalisasi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah yang disesuaikan dengan keunikan lokal Universitas Muhammadiyah Parepare

2. Perguruan Tinggi Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Sehingga PT Dapat Melakukan Tindak Lanjut.

Standar Nasional Pendidikan yang mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 mencakup komponen-komponen standar: 1) kompetensi lulusan; 2) isi pembelajaran; 3) proses pembelajaran; 4) penilaian pembelajaran; 5) dosen dan tenaga kependidikan; 6) sarana dan prasarana pembelajaran; dan 7) pembiayaan pembelajaran. Seluruh komponen standar dalam lingkup standar mutu pendidikan harus diusahakan untuk mencapai mutu yang diinginkan baik stakeholder internal maupun eksternal. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dititik beratkan pada penciptaan proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan kondusif agar dapat memberikan bekal kemampuan akademis dan profesional kepada mahasiswa, sehingga lulusan yang dihasilkan siap bersaing di pasar global (Ketut Bali Sastrawan, 2015: 1).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Ketua LPMU Universitas Muhammadiyah Parepare menyatakan bahwa:

Disetiap Fakultas telah memiliki Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang disingkat dengan GPMF. Pada periode sebelumnya organisasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas disebut dengan Unit Penjaminan Mutu yang disingkat dengan UPM. Pada tingkat program studi terdapat divisi-divisi merupakan bagian dari struktur LPMU.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa disetiap Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare telah memiliki Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang disingkat dengan GPMF, dimana GPMF berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari LPMU dalam mengevaluasi rencana dan program-program yang dijalankan disetiap fakultas demi meningkatkan kinerja baik dari pihak fakultas maupun di tingkat universitas, dalam melancarkan progress kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk RENSTRA dan RENOP maka dari pihak Rektorat dan pihak LPMU membagikan dokumen SPMI di setiap fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare,

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Ketua LPMU Universitas Muhammadiyah Parepare menyatakan bahwa:

Di setiap Fakultas telah memiliki dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan Akademik (Buku Satu) dan Kegiatan Non Akademik (Buku Dua), disamping dokumen-dokumen mutu yang lain.

Serta dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak LPMU hanya kepada pihak fakultas dengan prodi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris LPMU, yang menyatakan:

Keberadaan Dokumen SPMI pada tingkat Universitas baru ada pada tahun 2019 maka sosialisasi yang dilakukan oleh LPMU masih lebih fokus pada Fakultas dan program studi, sedangkan dosen kalau pun itu masih dilakukan secara parsial dalam artibawa sosialisasi itu dilakukan secara terbatas sesuai dengan topik tertentu

SPMI sebagai alat untuk menjamin pencapaian mutu standar pendidikan harus diupayakan agar sesuai yang diharapkan tentu bahwasannya tidak terlepas dari dukungan kepemimpinan serta proses manajerial yang baik untuk meningkatkan etos kerja civitas akademika demi terciptanya lingkungan akademik yang kondusif. Kemampuan manajerial ialah faktor penting dan strategis dalam kerangka peningkatan mutu dan kemajuan perguruan tinggi yang dipimpinnya.

Pemimpin perguruan tinggi yang bertanggung jawab harus menyadari bahwa perkembangan dan peningkatan mutu pengelolaan organisasi menjadi sangat penting. Karena itu, untuk dapat mengungkap mengenai kinerja, hasil dan dampak perguruan tinggi secara periodik dan teratur, harus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari pola manajemen perguruan tinggi sampai di lingkup Fakultas.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dari jawaban responden menyatakan:

Yang bertanggungjawab dalam pemenuhan atau pencapaian standar mutu sebagaimana tertuang dalam dokumen standar mutu secara operasional tentu adalah pihak Rektorat, pihak Biro dan pihak Fakultas, tetapi secara kelembagaan yang bertanggungjawab adalah mulai dari tingkat Universitas yaitu Badan Pembina Harian (BPH), Rektor dan Wakil Rektor, Lembaga. Sedangkan pada tingkat Fakultas tanggungjawab itu berada pada Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)

Begitupun dari hasil wawancara telah dilakukan, dari jawaban Sekretaris LPMU menyatakan:

Upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengendalikan standar mutu adalah dengan berpedoman pada manual mutu yang ditetapkan pada setiap standar mutu. Langkah pengendalian dilakukan didasarkan pada tahapan pengendalian yaitu dari mana harus dimulai dan berakhir dimana pengendalian tersebut

SPMI sebagai alat untuk menjamin pencapaian mutu standar pendidikan harus menetapkan lingkup yang memiliki indikator mutu agar memudahkan proses pengevaluasian pada saat proses audit berlangsung. Akan tetapi indikator-indikator tersebut hanya merupakan pedoman untuk mengukur efisiensi mutu pembelajaran. Evaluasi yang baik harus dapat menjelaskan hal-hal yang diperkirakan dapat dianggap sebagai atribut mutu perguruan tinggi,

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dari jawaban responden menyatakan:

Evaluasi ketercapaian standar dilakukan melalui Audit Internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU). Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui auditor yang ditugaskan oleh LPMU)

Begitupun dari hasil wawancara telah dilakukan, dari jawaban Staff LPMU menyatakan:

Upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengendalikan standar mutu adalah dengan berpedoman pada manual mutu yang ditetapkan pada setiap standar mutu. Langkah pengendalian dilakukan didasarkan pada tahapan pengendalian yaitu dari mana harus dimulai dan berakhir dimana pengendalian tersebut.

Pada ruang lingkup ini, LPM melalui SPMI akan memastikan bahwa setiap program studi telah merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi program studi melalui implementasi kurikulum yang mengacu pada MBKM serta program studi harus menciptakan atmosfer akademik yang sesuai dengan standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Begitupun dari hasil wawancara telah dilakukan, dari jawaban Ketua LPMU menyatakan:

Monev dilakukan secara rutin dan terjadwal yang dilaksanakan setiap akhir semester pada tahun akademik, dilakukan pada tingkatan program studi, dan dilakukan oleh lembaga Penjaminan Mutu Fakultas bersama-sama dengan divisi monev untuk disetiap program studi. Hasil monev di sampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk ditindak lanjuti dalam rapat tindak lanjut manajemen (RTM).

SPMI melalui proses audit internal mutu harus memastikan bahwa program studi memiliki standar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian hingga pelaporan penilaian sehingga melalui hasil audit internal mutu, standar proses ini akan terus mengalami peningkatan. Pada lingkup pendidikan tinggi.

Begitupun dari hasil wawancara telah dilakukan, dari jawaban Ketua LPMU menyatakan:

Audit mutu internal dilakukan sekali dalam setahun, kecuali ada sesuatu yang dianggap penting sehingga perlu dilakukan audit mutu internal. Audit mutu internal dilakukan oleh auditor-auditor internal melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Orientasi audit mutu internal adalah untuk mengevaluasi sampai sejauh mana ketercapaian standar mutu berdasarkan indikator pencapaian yang telah ditetapkan

Melalui proses audit internal mutu dalam hal ini, SPMI akan memastikan bahwa program studi memiliki sistem seleksi, sistem pengembangan, sistem retensi serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan

Standar pengelolaan pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan belajar mengajar dalam program studi yang harus dievaluasi secara periodik melalui SPMI untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan menciptakan suasana akademik yang baik. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran perguruan tinggi, maka komponen standar pembiayaan pembelajaran harus memiliki perencanaan yang baik meliputi biaya investasi pendidikan tinggi serta biaya operasional pendidikan tinggi. SPMI harus menjamin bahwa tujuan utama rencana anggaran pendapatan dan belanja ialah untuk mengembangkan perguruan tinggi melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perguruan Tinggi Telah Sesuai Dengan Keputusan, Kebijakan Dan Standar Nasional PT.

Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare (Universitas Muhammadiyah Parepare) harus tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pemerintah dan kebijakan Organisasi Muhammadiyah. Dengan demikian penyusunan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Parepare tetap memperhatikan hal-hal yang diamanatkan dari suatu kebijakan kedua organisasi tersebut dan menjadikan arahan dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan serta strategi pencapaian tujuan.

Dalam penyusunan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Parepare mengacu pada Program dan Kegiatan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya dikombinasikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare saat ini. Bahwa dalam penyusunan Rencana Operasional Program dan Kegiatan Universitas Muhammadiyah Parepare, perlu mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai pihak organisasi, meskipun secara yuridis formal Universitas Muhammadiyah Parepare adalah merupakan sebuah organisasi otonom, namun dalam praktek pengelolaan dan pengaturan Universitas Muhammadiyah Parepare adalah merupakan suatu organisasi yang tidak terlepas dari organisasi Muhammadiyah serta pihak pemerintahan pusat dan daerah.

Dokumen Rencana Operasional (RENOP) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018-2028. Dokumen ini memuat indikator kinerja dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran yang hendak dicapai baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek (target tahunan). Selain itu dijabarkan pula rencana strategi, mencakup program dan kegiatan-kegiatan yang harus dirujuk oleh pimpinan dalam pengembangan sumberdaya.

Dokumen RENOP disusun oleh suatu tim yang dibentuk oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dengan melibatkan unsur-unsur operasional Universitas Muhammadiyah Parepare. Penyusunan program/kegiatan di dalam Renop ini mengacu kepada isu-isu strategis dan kebijakan yang dituangkan pada Renstra Universitas Muhammadiyah Parepare. Beberapa kebijakan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra seperti 1). Program Bidang Pendidikan dan Pengajaran, 2). Program Bidang Penelitian, 3). Program Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, 4). Program Bidang Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK).

Dokumen ini juga berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran strategis dan termasuk target-target kuantitatif dan program utama untuk mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Parepare. Untuk mewujudkan visi, Universitas Muhammadiyah Parepare menetapkan Arah Pengembangan (Road Map) 2018-2033 yang dibagi dalam 3 (tiga). Setiap tahapan diturunkan menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Arah Pengembangan (Road Map) 2018-2033 dijabarkan berikut ini:

a. TAHAP 1 2018-2023.

Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai Universitas yang efisien dan efektif dalam pengembangan sumber daya Tahap ini merupakan tahapan pemberdayaan sumber daya melalui efisiensi dan efektivitas berdasarkan pada kelemahan Universitas Muhammadiyah Parepare. Tahap ini diharapkan UM Parepare sudah dapat memberdayakan semua sumberdaya yang ada seperti sumberdaya keuangan, aset, tenaga pengajar dan pendidik, mahasiswa, karyawan, maupun dari sumberdaya lingkungan yang ada dalam internal Universitas Muhammadiyah Parepare.

Kondisi ini tercermin pada berbagai komponen, yaitu komponen kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen dan karyawan, komponen pembelajaran melalui ketersediaan sarana dan prasarana, komponen riset melalui pemberdayaan hasil riset dan transformasi ilmu pengetahuan, komponen pengabdian dengan memberdayakan kelembagaan internal dan eksternal, serta komponen AIK melalui pengembangan kurikulum.

b. TAHAP 2 2023-2028.

Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai universitas yang unggul di tingkat regional dan nasional dalam menerapkan nilai-nilai Islam Jika efisiensi dan efektivitas sumberdaya telah terwujud serta dapat meningkatkan kesejahteraan dalam lingkup internal Universitas Muhammadiyah Parepare, maka selanjutnya akan tercipta universitas yang kondusif dalam melaksanakan caturdharma. Efisiensi dan efektivitas akan melahirkan sumberdaya yang profesional dalam segala bidang ilmu maka selanjutnya akan menciptakan branding universitas sebagai universitas yang unggul.

Untuk mewujudkan keunggulan ini berarti pengelolaan perlu mengarahkan terciptanya kompetensi dan keunggulan institusi. Selain itu, adanya kerjasama diberbagai pihak perlu diwujudkan dan diimplementasikan dalam catur dharma. Tahapan ini menghasilkan lulusan berbasis kompetensi keilmuan tertentu dan/atau berdasar dengan keunikan lokal serta didukung dengan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Transfer teknologi menjadi bagian pencapaian keunggulan bagi semua civitas akademik baik pendidikan, riset, dan pengabdian.

c. TAHAP 3 2028-2033

Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai universitas yang unggul di tingkat nasional dalam menerapkan nilai-nilai Islam Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai universitas yang unggul di tingkat regional dalam menerapkan nilai-nilai islami, maka selanjutnya adalah membawa citra Universitas Muhammadiyah Parepare ke tingkat nasional dengan tetap mempertahankan ciri kearifan lokal dalam nilai-nilai islami.

Tahap ini menjadi arah baru untuk pengembangan universitas menuju unggul di tingkat nasional namun tetap mempertahankan nilai-nilai islami. Pada tahap kedua melalui transfer teknologi, maka tahap ketiga adalah mewujudkan Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai universitas yang unggul di tingkat nasional dengan nilai tambah inovasi ilmu pengetahuan. Komponen pengembangan tahap ini meliputi komponen riset yang inovatif, peningkatan standar laboratorium, pemanfaatan layanan daring

2. Perguruan Tinggi Memiliki Nilai Dasar Pelaksanaan Kegiatan Operasional Sehingga Perguruan Tinggi Bisa Berkelanjutan

Universitas Muhammadiyah Parepare (Universitas Muhammadiyah Parepare) adalah bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang resmi berdiri pada Tanggal 10 Mei 1999 bertepatan dengan Tanggal 24 Muharram 1420 H berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 86/D/O/1999 Tanggal 10 Mei 1999, sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Parepare yang berdiri pada Tanggal 9 September 1963.

Menyadari bahwa pembangunan bidang pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, maka Universitas Muhammadiyah Parepare yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Parepare yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, akan senantiasa berikhtiar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dan dapat diterapkan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Universitas Muhammadiyah Parepare perlu mempersiapkan diri secara baik dengan menyusun rencana strategi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam menghadapi tantangan masa depan. Walaupun rencana strategi bersifat umum, namun diharapkan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan rencana-rencana strategi pelaksanaan kegiatan operasional baik di lembaga dan unit pada tingkat universitas dan tingkat fakultas serta unit di bawah fakultas.

Universitas Muhammadiyah Parepare perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan dari berbagai pihak, meskipun secara yuridis formal Universitas Muhammadiyah Parepare adalah merupakan sebuah organisasi otonom dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, namun dalam praktek pengelolaan dan pengaturan Universitas Muhammadiyah Parepare adalah merupakan suatu organisasi yang tidak terlepas dari organisasi dan pihak pemerintahan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan organisasi Muhammadiyah, sehingga dalam penyusunan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Parepare tetap mengacu pada visi dan misi Pendidikan Nasional dalam hal ini Pendidikan Tinggi serta visi dan misi organisasi Muhammadiyah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang selanjutnya dikombinasikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare saat ini.

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Parepare menggambarkan kondisi Universitas Muhammadiyah Parepare yang ingin diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika di masa yang akan datang. Rumusan visi diatas merupakan hasil perubahan dari rumusan visi sebelumnya yaitu Universitas Muhammadiyah Parepare yang Islami dan Kompetitif dalam IPTEKS. Adapun perubahan tersebut terletak pada kata kompetitif menjadi unggul yang mencerminkan bahwa Universitas Muhammadiyah Parepare perlu mengembangkan diri menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sejajar atau lebih dari perguruan tinggi lain. Target Universitas Muhammadiyah Parepare adalah menjadi perguruan tinggi yang masuk 5 (lima) terbaik di Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 dan masuk 10 (sepuluh) terbaik di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2023.

Arah kebijakan program merupakan suatu langkah taktis yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran dalam Implementasi suatu program dan kegiatan selama 5 Tahun mendatang, yaitu : Penetapan langkah strategi utama yang menjadi prioritas penentuan suatu program yang akan capai, penetapan program prioritas dan kewenangan-kewenangannya, penentuan langkah dan alternatif praktis dalam melakukan tindakan baik waktu dan sumberdaya yang digunakan, penentuan faktor-faktor penghambat yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan suatu arah kebijakan program pengembangan untuk jangka waktu tertentu,

3. Perguruan Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi sehingga PT dapat melakukan tindak lanjut

Penetapan standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua baik tingkat, Universitas, Fakultas, Lembaga Organisasi dan Program Studi di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare. Standar dan turunannya berlaku bagi seluruh Fakultas, Lembaga Organisasi dan program studi yang ada di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 51 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, Untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu, maka pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

SPM DIKTI terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI). Kebijakan mutu merupakan dokumen induk yang digunakan sebagai acuan dalam membuat/menyusun dan mengsahkan manual mutu dan standar mutu. Dokumen kebijakan berisi tentang cara, langkah atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan setiap standar yang ada pada Universitas Muhammadiyah Parepare.

Dokumen kebijakan mutu berfungsi sebagai panduan unit, dosen, tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI di Universitas Muhammadiyah Parepare. Penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Parepare merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 2 ayat) 1.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi: (1) Standar Nasional Pendidikan; (2) Standar Nasional Penelitian, dan (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, SPMI Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai salah satu PTM menambah 5 standar lain sebagai keunggulan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu: (1) Standar Jatidiri/Identitas, (2) Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Kemahasiswaan, dan (5) Standar Kerjasama.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Parepare mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhammadiyah yang meliputi Standar Jati Diri, Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumberdaya Manusia, Standar Keuangan,. Fokus kebijakan SPMI tidak hanya pada Catur Dharma, akan tetapi lebih dikembangkan pada aspek lain yang bukan kegiatan akademik (non akademik), seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri (internasional).

Tujuan SPMI Universitas Muhammadiyah Parepare yaitu untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP. SPMI juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Parepare. Selain itu, tujuan dari SPMI ini adalah sebagai sarana bagi civitas akademika dalam mengkomunikasikan agar SPMI yang berlaku dapat dijalankan di dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare, sebagai landasan atau dasar dalam menetapkan manual mutu, standar mutu dan formulir dalam SPMI, sebagai landasan dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila Universitas Muhammadiyah Parepare telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dinilai melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi. Untuk melihat bagaimana implementasi SPMI apakah melampaui SN Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI yaitu pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Muhammadiyah Parepare dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Universitas Muhammadiyah Parepare.

Manajemen SPMI Universitas Muhammadiyah Parepare mengikuti atau berdasarkan model siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus model yang ditetapkan dianggap dapat meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Parepare baik standar pendidikan, penelitian, pengabdian dan AIK. Melalui tujuan yang telah ditetapkan, maka sangat tepat jika menggunakan siklus model PPEPP.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bersama unit penanggungjawab standar terkait dengan perumusan pernyataan standar dan indikator ketercapaiannya. Standar yang telah dirumuskan ditetapkan oleh pimpinan, kemudian dilaksanakan oleh semua unit, baik ditingkat fakultas maupun ditingkat prodi, kemudian akan dievaluasi oleh tim Auditor Mutu Internal, dengan menggunakan instrumen penilaian agar dapat mengetahui sejauhmana ketercapaian standar, kemudian hasil penilaian evaluasi dimonitoring/dikendalikan oleh TIM Auditor sejauhmana keberhasilan audite dalam memperbaiki penilaian dari auditor, dengan berjalannya siklus PPEPP maka akan ada peningkatan dari semua standar.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor dilaporkan kepada pimpinan (Rektor) yang kemudian pimpinan mengundang seluruh pimpinan fakultas dan prodi, serta kepala biro/unit/lembaga untuk menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan, dengan demikian rektor dan seluruh jajarannya dapat mengetahui letak kelemahan/kekurangan yang perlu ditingkatkan/diperbaiki mutu

Hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dengan bentuk evaluasi model PPEPP merupakan kesiapan pelaksanaan akreditasi bagi program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare. Sehingga pelaksanaan akreditasi pada tingkat program studi dapat terlaksana dengan baik karena sudah melalui tahapan evaluasi internal.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan organisasi Muhammadiyah, 2014 mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar pengelolaan pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan belajar mengajar dalam program studi yang harus dievaluasi secara periodik melalui SPMI untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan menciptakan suasana akademik yang baik.

2. Universitas Muhammadiyah Parepare perlu mempersiapkan diri secara baik dengan menyusun rencana strategi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam menghadapi tantangan masa depan Implementasi suatu program dan kegiatan selama 5 Tahun mendatang, yaitu : Penetapan langkah strategi utama yang menjadi prioritas penentuan suatu program yang akan capai, penetapan program prioritas dan kewenangan-kewenangannya, penentuan langkah dan alternatif praktis dalam melakukan tindakan baik waktu dan sumberdaya yang digunakan, penentuan faktor-faktor penghambat yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan suatu arah kebijakan program pengembangan untuk jangka waktu tertentu
3. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Parepare mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhadiyah, Hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dengan bentuk evaluasi model PPEPPP merupakan kesiapan pelaksanaan akreditasi bagi program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk meningkatkan *good university governance* perguruan tinggi swasta hendaknya transparansi di perguruan tinggi swasta terkhusus Universitas Muhammadiyah Parepare melakukan sosialisasi kepada civitas akademik terutama bagian keuangan terkait pengelolaan serta memberikan informasi kepada publik melalui website perguruan tinggi
2. Perguruan tinggi swasta meningkatkan sistem pengendalian intern agar meminimalisasi serta mengawasi bentuk penyimpangan-penyimpangan pada perguruan tinggi swasta/ Universitas Muhammadiyah Parepare
3. Melakukan sosialisasi pentingnya dan peran strategis SPMI dan atau budaya mutu secara berkelanjutan terutama memberikan contoh dan keteladanan yang baik, kedisiplinan dan ketertiban administrative terutama dari pimpinan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
- Abdul Haris 2014 yang berjudul "Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Di Fakultas Saintek Uin Sunan Kalijaga
- Andi Indira Alfitasari Nur Palulu, Abdul Rahman Mus, Darwis Lannai. 2018. [Pengaruh Kualitas Auditor, Sistem Pengendalian Internal Dan Komite Audit Terhadap Audit Delay Pada Kantor Akuntan Publik Se Kota Makassar](http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/AJAR/article/view/51/26). Ajar Vol. 1 No. 1 (Agustus) 2018, 96 -112. <http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/AJAR/article/view/51/26>
- Amiruddin Amiruddin, Baso Amang. 2023. [Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal pada Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan](https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5013). SEIKO: Journal of Management & Business. 6/2/ 326-341. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5013>
- Ardini, Lilis., 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit*. Majalah Ekonomi Tahun XX, No. 3:6-7.
- Ayu Retno Wahyuni, Salim Basalamah, M Mursalim. 2020. [Analisis Implementasi Good Corporate Governance \(GCG\) Pada Bank Sulselbar Syariah](https://journal.ildikti9.id/Ekonomika/article/view/504/334). Jurnal Ekonomika 4/2/ 60-69. <https://journal.ildikti9.id/Ekonomika/article/view/504/334>
- Bastian, Indra. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Cetakan 1, Jakarta : Salemba Empat
- Baro'ah, Siti. "Manajemen Mutu Pendidikan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dalam Perspektif Total Qualit Management" (Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)
- Efendy, M. Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi,dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. (Tesis). Semarang: Magister Sains

- Evanuarini, H., Nurliyani, Indratiningsih, & Hastuti, P. (2015). "Characteristic of Low Fat Mayonnaise Containing Porang Flour as Stabilizer. Pakistan Journal of Nutrition. 14(7): 392-295." Diakses dari <https://docsdrive.com/pdfs/ansinet/pjn/2015/392-395.pdf>
- Fereday, J. & Cochrane, E. (2015). Demonstrating rigor using thematic analysis : a hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods, 5 (1), pp. 1-11.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", Journal of Finance Economic 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Kartini Kartono, 2013. Pemimpin Dan Kepemimpinan, Jakarta: Rajawali Press
- Su'un Su'un. 2021. [Several factors affect the audit quality in South Sulawesi Inspectorate](http://repository.umi.ac.id/620/2/10%20jurnal.pdf). Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi.JILID 1.2. Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah FEB UMI. <http://repository.umi.ac.id/620/2/10%20jurnal.pdf>
- Nurfadillah Said, Syamsu Alam, Kirana Ikhtiari.2022. [Pengaruh Integritas dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar](https://doi.org/10.24054/CESJ.V1I1.2022.12651). 2022/1/26.5/1. CESJ: Center Of Economic Students Journal.
- M. Syaifudin 2015 yang berjudul "Manajemen Standar Nasional Pendidikan Tinggi Di Stain Kediri. Gelar Magister Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam YOGYAKARTA
- Mabruri, H. Winarna, J., 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Pemerintah Daerah. *SNA XIII, Purwokerto*. www.Sna13purwokerto.com.
- Mulyadi. 2014. *Auditing, Buku I*. Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Nataline. (2007). Pengaruh Batasan Audit , Pengetahuan akuntansi dan auditing, bonus serta pengalaman terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nugrahini, P., 2015. *Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit: Empiris pada BUMN dan BUMD*, Yogyakarta: Studi Empiris.
- Parasayu, A., 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal: Kasus di Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Jawa Tengah, Kab. Boyolali*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Prasetyo Danang, F., 2016. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, Integritas, Objektivitas dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit: Studi pada Kantor Akuntan Publik, Jawa Tengah*
- Pradana, Anung Ahadi et al. 2023. "Analisis Pencapaian Audit Mutu Internal STIKes Mitra Keluarga Rentang 2020-2021." Jurnal Penjaminan Mutu 9(01): 80–92.
- Winarna, J. dan Mabruri, H., 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Intern: *Journal of Rural Development*. Vol 6(1).
- Wolfensohn, James. D. 1999. Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar. World Bank.
- Syamsiah 2012 yang berjudul "Manajemen Mutu Pgmi Fakultas Fitk Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Susilawati. 2014. *Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit: Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Etikoomi.13 (2).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung